

HUKUM BISNIS

Pada dunia bisnis yang dinamis dan serba cepat seperti saat ini, memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek hukum adalah kunci keberhasilan bagi para wirausaha. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak hanya diperlukan visi yang kuat dan strategi yang tepat, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengaturnya. Dari perizinan hingga kontrak, dari hak kekayaan intelektual hingga kewajiban terhadap karyawan, hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan sebuah usaha. Buku ini bertujuan untuk menyajikan sebuah panduan yang komprehensif bagi para wirausaha yang ingin memahami pentingnya hukum dalam mengelola bisnis mereka. Kami akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk peraturan yang mengatur pendirian bisnis, perlindungan merek dagang, tanggung jawab perusahaan, dan banyak lagi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis, para pemilik usaha dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan melindungi kepentingan bisnis mereka.

Buku ini membahas tentang Pengantar Hukum Bisnis, Struktur Perusahaan dan Tanggung Jawab Hukum, Kontrak Bisnis, Perlindungan Konsumen, Per;indungan Kekayaan Intelektual, Regulasi Lingkungan dan Bisnis, Penyelesaian Sengketa, Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



HUKUM BISNIS

**KBP Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.Si.
Dr. Teddy Oswari, S.E., M.M., M.I.Kom.**

HUKUM BISNIS



HUKUM BISNIS

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM BISNIS

KBP Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.Si.

Dr. Teddy Oswari, S.E., M.M., M.I.Kom.



HUKUM BISNIS

Penulis:

**KBP Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.Si.
Dr. Teddy Oswari, S.E., M.M., M.I.Kom.**

Editor:

Andi Asari dan Annisa Febryanti

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

vi, 98 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8638-00-0

Cetakan Pertama:

April 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Hukum Bisnis. Buku ini di susun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. Buku ini membahas tentang Pengantar Hukum Bisnis, Struktur Perusahaan dan Tanggung Jawab Hukum, Kontrak Bisnis, Perlindungan Konsumen, Perindungan Kekayaan Intelektual, Regulasi Lingkungan dan Bisnis, Penyelesaian Sengketa, Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum.

Kami menyadari bahwa buku yang ada ditangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 27 April 2024

Daftar Isi

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	iii
PENDAHULUAN -----	1
BAB 1 - PENGANTAR HUKUM BISNIS -----	3
1.1 Pengertian Hukum Bisnis-----	3
1.2 Sumber Hukum Bisnis-----	5
1.3 Ruang Lingkup Hukum Bisnis-----	8
1.4 Fungsi Hukum Bisnis-----	10
1.5 Tujuan Hukum Bisnis-----	12
BAB 2 - STRUKTUR PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM -----	15
2.1. Pengenalan Struktur Perusahaan-----	15
2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Struktur Perusahaan-----	17
2.3. Tanggung Jawab Hukum dalam Struktur Perusahaan-----	21
2.4. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis-----	22
BAB 3 - KONTRAK BISNIS -----	25
3.1 Definisi dan Interpretasi-----	25
3.2 Deskripsi Produk atau Layanan-----	26
3.3 Kewajiban dan Tanggung Jawab-----	28
3.4 Pembatalan atau Pemutusan Kontrak-----	30

3.5 Perubahan pada Kontrak-----	32
BAB 4 - PERLINDUNGAN KONSUMEN-----	37
4.1 Konsumen Dan Perlindungan Konsumen -----	37
4.2 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen -----	39
4.3 Asas Perlindungan Konsumen -----	40
4.4 Hak dan Kewajiban Konsumen -----	45
BAB 5 - PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL -----	47
5.1 Pengenalan Kekayaan Intelektual-----	47
5.2 Hak Cipta -----	50
5.3 Merek Dagang-----	52
5.4 Paten -----	55
5.5 Desain Industri dan Rancangan Tata Letak Sirkuit Terpadu ----	56
BAB 6 - REGULASI LINGKUNGAN DAN BISNIS-----	57
6.1 Undang-Undang Lingkungan -----	57
6.2 Perizinan dan Persyaratan Lingkungan -----	59
6.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) -----	63
6.4 Pajak dan Insentif -----	64
6.5 Transparansi dan Pelaporan-----	65
BAB 7 - PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS -----	67
7.1 Pentingnya Penyelesaian Sengketa Bisnis -----	67
7.2 Jenis-Jenis Sengketa Bisnis-----	70
7.3 Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis -----	72
BAB 8 - ETIKA BISNIS DAN KEPATUHAN HUKUM -----	77
8.1 Etika Bisnis -----	77
8.2 Kepatuhan Hukum -----	81
8.3 Sinergi antara Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum -----	84
KESIMPULAN -----	87

DAFTAR PUSTAKA ----- 89

BIODATA PENULIS ----- 97

Pendahuluan

Pada dunia bisnis yang dinamis dan serba cepat seperti saat ini, memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek hukum adalah kunci keberhasilan bagi para wirausaha. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak hanya diperlukan visi yang kuat dan strategi yang tepat, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengaturnya. Dari perizinan hingga kontrak, dari hak kekayaan intelektual hingga kewajiban terhadap karyawan, hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan sebuah usaha. Buku ini bertujuan untuk menyajikan sebuah panduan yang komprehensif bagi para wirausaha yang ingin memahami pentingnya hukum dalam mengelola bisnis mereka. Kami akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang relevan, termasuk peraturan yang mengatur pendirian bisnis, perlindungan merek dagang, tanggung jawab perusahaan, dan banyak lagi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis, para pemilik usaha dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan melindungi kepentingan bisnis mereka.

Pada tahap ini, penting untuk menyadari bahwa hukum bisnis bukanlah sekadar formalitas yang harus dipenuhi, tetapi merupakan alat yang kuat untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi kesuksesan jangka panjang. Dengan mengetahui hak dan kewajiban mereka, wirausaha dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, serta merancang strategi bisnis yang lebih inovatif dan berdaya saing. Oleh karena itu, buku ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum bisnis dapat menjadi mitra yang tak tergantikan dalam

membangun dan mengelola bisnis yang sukses. Dengan demikian, marilah kita menjelajahi dunia hukum bisnis bersama-sama, menemukan keterkaitan yang erat antara keberhasilan bisnis dan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang mengaturnya. Dengan pengetahuan yang tepat dan sikap yang proaktif, kita dapat menjadikan hukum sebagai alat yang kuat untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis yang terus berubah dan berkembang. Tetaplah bersama kami untuk menggali lebih dalam tentang aspek-aspek kunci dalam hukum bisnis dan bagaimana hal tersebut dapat membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda dengan lebih efektif. Bersiaplah untuk menjadikan hukum sebagai mitra strategis dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan dalam dunia bisnis yang penuh tantangan ini.



Bab 1

PENGANTAR HUKUM BISNIS

1.1 Pengertian Hukum Bisnis

Sejak zaman kuno, manusia telah terlibat dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Perdagangan lintas negara, perjanjian dagang, dan transaksi komersial telah menjadi bagian integral dari perkembangan peradaban manusia. Hukum bisnis berkembang sebagai respons terhadap kompleksitas dan kebutuhan pengaturan dalam kegiatan perdagangan dan bisnis. Dengan bertambahnya jumlah pihak yang terlibat dalam bisnis, seperti pemilik usaha, investor, karyawan, konsumen, dan pemerintah, muncul kebutuhan untuk melindungi kepentingan mereka. Hukum bisnis

memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Pada perkembangannya, saat ini bisnis telah memasuki globalisasi dan terkoneksi semua antar negara. Dalam globalisasi dan interkoneksi ekonomi, sengketa antarbisnis atau antarindividu dari berbagai negara menjadi lebih kompleks. Hukum bisnis memberikan landasan untuk penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, sehingga memastikan kestabilan dalam lingkungan bisnis. Regulasi yang jelas dan konsisten dalam hukum bisnis memberikan kepastian kepada pelaku bisnis, investor, dan konsumen. Hal ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena mereka dapat memperkirakan risiko dan mengambil keputusan yang tepat secara bisnis. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, bisnis dan perdagangan tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis. Oleh karena itu, regulasi dan hukum bisnis menjadi semakin penting untuk mengatasi tantangan dan risiko yang timbul dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.

Hukum bisnis, atau yang dikenal sebagai *business law*, adalah cabang hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan urusan atau kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, produksi, serta penempatan uang. Dalam kerangka ini, hukum bisnis mencakup berbagai aspek yang melibatkan aktivitas bisnis, baik itu dalam skala kecil maupun besar (Sri Ka'bah & Hasan, 2024).

Pengertian dari Hukum bisnis adalah sistem hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan diatur, termasuk upaya penegakannya. Ini mencakup aspek-aspek seperti produksi, pertukaran barang atau jasa, serta pengelolaan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan risiko tertentu dan dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (Vijayantera & Dewi, 2021).

Secara lebih rinci, hukum bisnis mengatur berbagai hal seperti pembentukan dan struktur perusahaan, hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis,

perlindungan hak kekayaan intelektual, perpajakan, kepailitan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan operasi dan pengelolaan bisnis. Selain itu, hukum bisnis juga mencakup aspek hukum yang terkait dengan kegiatan investasi, seperti pengaturan tentang pasar modal, peraturan tentang merger dan akuisisi, serta perjanjian investasi lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa dalam setiap kegiatan bisnis, para pengusaha atau entrepreneur diharapkan untuk mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, hukum bisnis juga memberikan kerangka kerja yang mengatur tanggung jawab hukum dan risiko dalam setiap transaksi atau kegiatan bisnis yang dilakukan.

1.2 Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis merupakan landasan atau dasar pembentukan hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis. Sumber hukum bisnis mencakup berbagai prinsip, aturan, dan peraturan yang digunakan sebagai panduan bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan mereka. Berikut adalah penjelasan mengenai sumber-sumber hukum bisnis:

1. Asas Kontrak

Asas kontrak adalah prinsip dasar dalam hukum bisnis yang menegaskan pentingnya perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Asas ini menyatakan bahwa setiap pihak harus mematuhi aturan yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian bisnis.

2. Asas Kebebasan Kontrak

Asas kebebasan kontrak menyatakan bahwa para pelaku bisnis memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis memiliki otonomi dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian.

Secara umum, sumber-sumber hukum bisnis menurut perundang-undangan meliputi:

- **Hukum Perdata (KUH Perdata)**
Hukum perdata mengatur hubungan antara individu-individu atau badan hukum dalam masyarakat. Ini mencakup peraturan mengenai kontrak, tanggung jawab, ganti rugi, dan hal-hal lain yang terkait dengan hubungan hukum antara individu.
- **Hukum Publik (Pidana Ekonomi/KUH Pidana)**
Hukum publik mengatur hubungan antara individu dan pemerintah atau negara. Dalam hukum bisnis, hukum pidana ekonomi atau hukum pidana secara umum mengatur tindakan kriminal yang terkait dengan kegiatan bisnis.
- **Hukum Dagang (KUH Dagang)**
Hukum dagang mengatur kegiatan bisnis, perdagangan, dan transaksi komersial. Ini mencakup aspek-aspek seperti perusahaan, perjanjian dagang, surat berharga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.

Selain itu, menurut Munir Fuady, sumber hukum bisnis juga dapat meliputi:

- **Perundang-undangan**
Perundang-undangan merupakan kumpulan aturan yang terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, serta ketentuan lain yang mengatur hukum bisnis. Ini mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan kegiatan bisnis, seperti pembentukan perusahaan, kontrak, hak kekayaan intelektual, perpajakan, perlindungan konsumen, dan lain sebagainya. Perundang-undangan ini menjadi landasan utama bagi para pelaku bisnis untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka, serta untuk menghindari risiko hukum yang mungkin timbul.

- Perjanjian

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Kesepakatan ini menjadi dasar hukum bagi hubungan bisnis mereka, mengatur hak dan kewajiban serta menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Perjanjian bisnis dapat berupa kontrak tertulis maupun kesepakatan lisan, namun dalam kedua kasus tersebut, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang terlibat. Dengan demikian, perjanjian memainkan peran penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian dalam hubungan bisnis, serta menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksepakatan di antara para pihak.

- Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih negara dan memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan bisnis lintas negara. Traktat ini menetapkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak antar negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, serta mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, perlindungan asing, dan kerja sama ekonomi lainnya. Dengan demikian, traktat menjadi landasan hukum yang penting dalam menjalankan bisnis di lintas negara, karena mempengaruhi regulasi dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut.

- Yurisprudensi

Yurisprudensi merujuk pada putusan-putusan pengadilan yang telah menjadi preseden atau contoh dalam penyelesaian sengketa bisnis. Putusan ini membentuk dasar hukum yang menjadi acuan bagi kasus serupa di masa mendatang, memberikan panduan bagi pengusaha dan ahli hukum dalam memahami dan menafsirkan hukum yang relevan dalam ruang lingkup bisnis. Dengan demikian, yurisprudensi memiliki peran penting dalam membentuk kepastian hukum dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum terkait dengan bisnis.

- **Kebiasaan dan Doktrin Ahli Hukum**

Kebiasaan dan doktrin ahli hukum merujuk pada norma-norma yang berkembang dalam praktik bisnis dan pandangan-pandangan yang diakui oleh para ahli hukum. Ini mencakup aturan tidak tertulis yang menjadi kebiasaan dalam praktik bisnis, serta pandangan-pandangan yang diterima dan diakui oleh komunitas ahli hukum sebagai bagian dari interpretasi dan aplikasi hukum dalam ruang lingkup bisnis. Dengan memperhatikan kebiasaan dan doktrin ini, para pelaku bisnis dapat memahami praktik-praktik yang diterima dalam industri dan menghindari potensi konflik atau sengketa hukum.

Dengan memahami sumber-sumber hukum bisnis ini, para pelaku bisnis dapat menjalankan kegiatan bisnis mereka dengan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, serta mengelola risiko hukum yang terkait dengan kegiatan bisnis mereka.

1.3 Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis merujuk pada area atau topik yang diatur oleh hukum dalam kegiatan bisnis. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek penting yang terkait dengan operasi, interaksi, dan transaksi bisnis. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam ruang lingkup hukum bisnis:

1. Pendirian dan Struktur Perusahaan

Pendirian dan struktur perusahaan merujuk pada proses pembentukan dan organisasi badan hukum seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, dan sejenisnya. Hukum bisnis mengatur berbagai tahapan, mulai dari pendirian hingga pengelolaan perusahaan, termasuk proses registrasi, kepemilikan saham, serta pengaturan struktur internal dan eksternal perusahaan (Zahra et al., 2023).

2. Kontrak dan Transaksi

Hukum bisnis mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam

transaksi bisnis. Kontrak dan transaksi mencakup pembelian, penjualan, penyewaan, dan berbagai bentuk perjanjian komersial lainnya.

3. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah aspek penting yang mendapat perlindungan hukum. Ini mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Hukum bisnis menetapkan prosedur untuk pendaftaran, penegakan, dan penyelesaian sengketa terkait dengan HKI. Melalui perlindungan hukum ini, pemegang hak kekayaan intelektual dapat memastikan bahwa karyanya diakui, dilindungi, dan digunakan dengan tepat oleh pihak lain, serta dapat menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka (Tampi, 2020).

4. Hubungan Ketenagakerjaan

Hubungan ketenagakerjaan merujuk pada peraturan yang mengatur hubungan antara pengusaha dan karyawan dalam kegiatan bisnis. Ini meliputi berbagai aspek seperti ketentuan tentang kontrak kerja, besaran upah, kondisi kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak pekerja. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja.

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam hukum bisnis yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau menyesatkan. Hukum bisnis menetapkan berbagai persyaratan, seperti labeling yang jelas, jaminan produk, serta melarang praktik penipuan konsumen. Selain itu, hukum juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam hukum bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat bertransaksi dengan aman dan

mendapatkan perlakuan yang adil dari para pelaku bisnis (Sunanto et al., 2024).

6. Pasar Modal dan Investasi

Pasar modal dan Investasi mencakup regulasi pasar modal, perdagangan sekuritas, dan kegiatan investasi lainnya. Hukum bisnis mengatur proses pendaftaran emisi sekuritas, transaksi pasar modal, serta perlindungan investor.

7. Kepailitan dan Penyelesaian Sengketa

Hukum bisnis mengatur proses kepailitan, termasuk pengajuan klaim, penyelesaian aset, dan distribusi hasil penjualan. Selain itu, hukum bisnis juga mencakup proses penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui jalur pengadilan maupun alternatif seperti mediasi dan arbitrase.

8. Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan mencakup regulasi yang mengatur kewajiban perpajakan perusahaan dan individu dalam kegiatan bisnis. Hukum bisnis mengatur pembayaran pajak, pelaporan, dan proses penyelesaian sengketa perpajakan.

Ruang lingkup hukum bisnis sangat luas dan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam praktik bisnis dan perkembangan ekonomi. Melalui regulasi dan penegakan hukum yang efektif, hukum bisnis berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan.

1.4 Fungsi Hukum Bisnis

Hukum dalam bisnis ada pastinya memiliki fungsi untuk menanganui bisnis. Fungsi Hukum Bisnis sangatlah penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan lingkungan bisnis (Fatimah et al., 2022). Beberapa fungsi atau manfaat hukum bisnis antara lain:

1. Sebagai Sumber Informasi

Hukum bisnis dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Ini memungkinkan mereka untuk memahami regulasi yang berlaku dan hak serta kewajiban yang dimiliki dalam praktik bisnis.

2. Penjelasan tentang Hak dan Kewajiban

Hukum bisnis memberikan penjelasan yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam praktik bisnis. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan yang ada, pelaku bisnis dapat membangun usaha mereka dengan mematuhi hukum yang berlaku, sehingga mencegah adanya penyimpangan dan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

3. Membentuk Watak dan Perilaku

Hukum bisnis juga berperan dalam membentuk watak dan perilaku pelaku bisnis. Melalui kepastian hukum yang diberikan, diharapkan terwujudnya kegiatan bisnis atau usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

4. Melindungi Pihak-pihak yang Terlibat

Salah satu fungsi utama hukum bisnis adalah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti pemilik usaha, investor, karyawan, dan konsumen. Dengan adanya regulasi yang jelas, hak-hak mereka dapat terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan atau tidak sah.

5. Menjaga Kestabilan dan Pertumbuhan Ekonomi

Hukum bisnis juga berperan dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memberikan kerangka kerja yang dapat dipercaya, hukum bisnis menciptakan kepastian bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usaha mereka, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hukum bisnis memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesehatan

lingkungan bisnis, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

1.5 Tujuan Hukum Bisnis

Hukum bisnis dibuat memiliki tujuan, tujuan hukum bisnis sangatlah beragam dan meliputi berbagai aspek dalam rangka menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan (Juanda & Ali, 2022). Berikut adalah beberapa tujuan utama hukum bisnis:

1. Menjamin Efisiensi dan Kelancaran Pasar

Salah satu tujuan utama hukum bisnis adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar beroperasi secara efisien dan lancar. Hal ini mencakup pengaturan yang memfasilitasi perdagangan yang adil, transparan, dan bebas persaingan yang tidak sehat.

2. Perlindungan Terhadap Usaha

Hukum bisnis bertujuan untuk melindungi berbagai jenis usaha, termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM), dari praktik bisnis yang merugikan dan persaingan yang tidak sehat. Perlindungan ini mencakup hak-hak kekayaan intelektual, hak kontrak, serta hak-hak lain yang mendasar bagi keberlangsungan usaha (Noor et al., 2021).

3. Perbaikan Sistem Keuangan dan Perbankan

Tujuan lain dari hukum bisnis adalah untuk membantu memperbaiki dan mengatur sistem keuangan dan perbankan. Hal ini termasuk regulasi yang mengatur kegiatan perbankan, transaksi keuangan, serta pengaturan yang memastikan stabilitas sistem keuangan.

4. Perlindungan Terhadap Pelaku Bisnis

Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, termasuk pemilik usaha, investor, karyawan, konsumen,

dan pihak lainnya. Perlindungan ini mencakup hak-hak kontraktual, hak-hak konsumen, serta tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan dalam berbisnis.

5. Mewujudkan Bisnis yang Aman dan Adil

Tujuan akhir dari hukum bisnis adalah untuk mewujudkan lingkungan bisnis yang aman, adil, dan dapat dipercaya bagi semua pelaku bisnis. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil, penyelesaian sengketa yang efisien, serta memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan etika.

Dengan demikian, tujuan-tujuan ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang mengatur dan mendukung kegiatan bisnis dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.



Bab 2

STRUKTUR PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM

2.1. Pengenalan Struktur Perusahaan

Struktur perusahaan merupakan fondasi organisasional yang mendasari entitas bisnis dalam operasinya. Secara esensial, struktur perusahaan menetapkan kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan diorganisir, dijalankan, dan bertanggung jawab atas kegiatan bisnisnya. Dalam konteks hukum bisnis, pemahaman yang mendalam tentang struktur perusahaan sangatlah penting karena berdampak pada tanggung jawab hukum, perlindungan terhadap kekayaan pribadi, serta kewajiban

pajak perusahaan. Definisi struktur perusahaan merujuk pada organisasi internal dan kerangka kerja yang menetapkan bagaimana perusahaan diorganisir, dijalankan, dan bertanggung jawab atas operasinya (Gibson & Osborne, 2020). Ini mencakup aspek legal, seperti status hukum perusahaan, serta struktur operasional, termasuk hierarki manajemen dan pengambilan keputusan.

2.1.1. Tujuan dan Manfaat Struktur Perusahaan dalam Konteks Hukum Bisnis

Tujuan utama dari struktur perusahaan adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dalam konteks hukum bisnis, struktur perusahaan memiliki beberapa manfaat, termasuk:

- Menetapkan kejelasan dalam tanggung jawab hukum perusahaan.
- Melindungi kekayaan pribadi pemilik atau pemegang saham dari tanggung jawab perusahaan.
- Memfasilitasi pengumpulan modal dan investasi dengan cara yang efisien dan jelas.
- Menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Jenis-jenis Struktur Perusahaan:

Berbagai jenis struktur perusahaan memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam organisasi dan pengelolaan entitas bisnis. Penjelasan mendalam tentang jenis-jenis ini adalah sebagai berikut:

- **Perusahaan Perseorangan:** Perusahaan perseorangan adalah jenis struktur di mana bisnis dimiliki dan dijalankan sepenuhnya oleh satu orang. Pemilik tunggal bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan keputusan bisnis. Karena tidak ada pemisahan antara pemilik dan perusahaan, pemilik berisiko secara pribadi atas kegagalan atau masalah hukum yang timbul dalam bisnis.

- **Perseroan Terbatas (PT):** Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas hukum yang terpisah secara legal dari pemiliknya. Pemiliknya disebut sebagai pemegang saham, yang memiliki tanggung jawab terbatas hanya terhadap jumlah modal yang mereka investasikan dalam perusahaan. PT memberikan keamanan hukum bagi pemegang saham dan memungkinkan pengumpulan modal yang lebih besar daripada perusahaan perseorangan.
- **Koperasi:** Koperasi adalah struktur perusahaan di mana bisnis dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk keuntungan bersama. Anggota memiliki tanggung jawab dan kekuasaan yang sama dalam pengambilan keputusan dan berbagi keuntungan. Koperasi cenderung menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dan sering kali berfokus pada kepentingan anggota dan komunitas.
- **Badan Usaha Lainnya:** Selain perusahaan perseorangan, PT, dan koperasi, terdapat juga berbagai jenis badan usaha lainnya. Ini termasuk partnership, di mana dua atau lebih individu berbagi tanggung jawab dan keuntungan; kemitraan terbatas, di mana beberapa mitra memiliki keterbatasan tanggung jawab; dan badan usaha non-profit, yang bertujuan untuk tujuan sosial atau amal tanpa keuntungan finansial.

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Struktur Perusahaan

Pemilihan struktur perusahaan merupakan keputusan krusial yang mempengaruhi berbagai aspek operasional, hukum, dan keuangan suatu entitas bisnis (Ross et al., 2003). Sejumlah faktor menjadi pertimbangan utama dalam proses ini, yang meliputi pertimbangan hukum, pajak, operasional, dan keuangan.

2.2.1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan struktur perusahaan. Tiap jenis struktur perusahaan membawa implikasi hukum yang berbeda,

termasuk dalam proses pendiriannya, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang saham.

Perseroan Terbatas (PT) memiliki keberadaan yang terpisah secara hukum dari pemiliknya. Ini berarti bahwa PT dianggap sebagai entitas hukum yang mandiri, sehingga pemilik atau pemegang saham tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban atau utang perusahaan tersebut. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang penting bagi pemilik atau pemegang saham.

Tidak ada pemisahan yang jelas antara bisnis dan pemiliknya dalam perusahaan perseorangan, maka pemilik bisnis akan memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi atas semua kewajiban perusahaan, termasuk utang dan klaim hukum. Ini menempatkan pemilik dalam risiko yang lebih tinggi secara pribadi, karena harta pribadinya dapat digunakan untuk membayar kewajiban bisnis.

Dalam pemilihan struktur perusahaan, penting bagi pemilik atau calon pengusaha untuk memahami konsekuensi hukum dari masing-masing opsi. Memperoleh nasihat hukum yang tepat sangat penting dalam memastikan bahwa struktur perusahaan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pemangku kepentingan.

2.2.2. Pertimbangan Pajak

Aspek pajak memegang peranan krusial dalam pemilihan struktur perusahaan. Tiap struktur perusahaan membawa implikasi pajak yang berbeda, termasuk tarif pajak yang berlaku dan insentif pajak yang mungkin tersedia.

Sebagai contoh, Perseroan Terbatas (PT) dalam beberapa yurisdiksi mungkin dapat menikmati tarif pajak yang lebih rendah atau fasilitas pajak khusus yang tidak tersedia bagi struktur perusahaan lainnya. Ini dapat menjadi keuntungan signifikan bagi pemilik bisnis, karena dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan bersih yang dapat digunakan

untuk pengembangan bisnis lebih lanjut atau distribusi kepada pemegang saham.

Beberapa struktur perusahaan mungkin memberikan fleksibilitas dalam perencanaan pajak yang lebih baik. Misalnya, dalam beberapa kasus, perusahaan koperasi dapat memperoleh perlakuan pajak khusus yang menguntungkan anggotanya.

Implikasi pajak dari setiap struktur perusahaan dapat berbeda berdasarkan yurisdiksi hukum tempat perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karena itu, dalam pemilihan struktur perusahaan, dianjurkan bagi pemilik bisnis untuk memperoleh saran pajak yang tepat dari profesional yang berkualifikasi, agar dapat memahami konsekuensi pajak yang sesuai dengan situasi bisnis mereka.

2.2.3. Pertimbangan Operasional

Pertimbangan operasional merupakan faktor penting dalam pemilihan struktur perusahaan. Ini mencakup berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana bisnis dijalankan sehari-hari, seperti fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, struktur manajemen, dan kompatibilitas dengan model bisnis yang dijalankan.

Struktur perusahaan yang dipilih harus mampu memenuhi kebutuhan operasional bisnis dengan efektif. Sebagai contoh, dalam perusahaan yang memerlukan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar, struktur perusahaan yang memiliki proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi mungkin lebih sesuai. Di sisi lain, dalam perusahaan dengan skala operasi yang besar dan kompleks, struktur perusahaan dengan hierarki manajemen yang jelas dan terstruktur mungkin lebih efisien dalam mengkoordinasikan aktivitas bisnis.

Struktur perusahaan juga harus kompatibel dengan model bisnis yang dijalankan. Sebagai contoh, dalam bisnis yang menekankan inovasi dan eksperimen, struktur perusahaan yang memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam pengembangan produk atau layanan mungkin lebih sesuai. Sementara itu, dalam

bisnis yang menekankan efisiensi operasional dan standarisasi proses, struktur perusahaan yang memiliki kontrol yang ketat dan standar operasional yang jelas mungkin lebih cocok.

Pemilihan struktur perusahaan yang tepat akan membantu memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara efisien dan efektif sesuai dengan strategi pertumbuhan dan pengembangan jangka panjang yang ditetapkan.

2.2.4. Pertimbangan Keuangan

Pertimbangan keuangan menjadi salah satu aspek kunci yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan struktur perusahaan. Ini meliputi berbagai hal, mulai dari kemampuan untuk mengumpulkan modal hingga pengelolaan utang, serta optimasi struktur modal perusahaan.

Pertimbangan utama dalam pertimbangan keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan modal. Struktur perusahaan yang dipilih harus mampu mendukung upaya perusahaan dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk operasi dan pertumbuhan bisnis. Misalnya, perusahaan yang berencana untuk mengumpulkan modal dari investor eksternal mungkin lebih memilih struktur perusahaan yang dapat menawarkan saham kepada publik, seperti perseroan terbatas. Di sisi lain, perusahaan yang ingin mempertahankan kendali kepemilikan dan tidak bergantung pada investor eksternal mungkin memilih struktur perusahaan yang lebih tertutup, seperti perusahaan perseorangan atau kemitraan.

Pengelolaan utang juga menjadi pertimbangan penting. Struktur perusahaan yang dipilih harus mampu mengakomodasi kebutuhan perusahaan dalam mengelola utang, termasuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Struktur yang tepat dapat membantu mengurangi risiko kebangkrutan dan memberikan fleksibilitas keuangan yang diperlukan bagi pertumbuhan bisnis.

Optimasi struktur modal juga merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan struktur perusahaan. Struktur modal yang optimal akan membantu perusahaan mencapai keseimbangan

yang tepat antara modal ekuitas dan modal utang, yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan mengurangi biaya keuangan.

2.3. Tanggung Jawab Hukum dalam Struktur Perusahaan

Tanggung jawab hukum dalam struktur perusahaan merupakan aspek penting yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab entitas hukum serta individu yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini, ada tiga tingkatan tanggung jawab yang perlu dipahami secara mendalam, yaitu tanggung jawab individu pemilik atau pemegang saham, tanggung jawab direksi dan manajemen perusahaan, serta tanggung jawab perseroan sebagai entitas hukum.

2.3.1. Tanggung Jawab Individu Pemilik atau Pemegang Saham

Pada tingkat ini, individu pemilik atau pemegang saham bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dalam struktur perusahaan tertentu, seperti perusahaan perseorangan atau kemitraan, pemilik pribadi dapat memiliki tanggung jawab pribadi atas hutang dan kewajiban perusahaan (Boukattaya et al., 2021). Sementara itu, dalam perusahaan yang lebih besar seperti perseroan terbatas (PT), tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah modal yang disetorkan.

2.3.2. Tanggung Jawab Direksi dan Manajemen Perusahaan

Direksi dan manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap keputusan dan tindakan yang diambil untuk kepentingan perusahaan. Mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik, berdasarkan kepentingan perusahaan dan *stakeholder*-nya. Tanggung jawab mereka termasuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjaga keuangan dan reputasi perusahaan.

2.3.3. Tanggung Jawab Perseroan sebagai Entitas Hukum

Perseroan sebagai entitas hukum memiliki tanggung jawabnya sendiri, terpisah dari individu-individu yang terlibat dalam operasional perusahaan. Ini berarti perseroan dapat dituntut secara hukum dan memiliki kewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Tanggung jawab perseroan mencakup pembayaran pajak, pemenuhan kontrak, dan tanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan.

2.4. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis

Dalam konteks hukum bisnis, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum adalah pedoman atau aturan moral yang mengatur perilaku perusahaan dan individu-individu yang terlibat dalam operasinya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak secara etis, mematuhi hukum yang berlaku, dan bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya.

2.4.1. Prinsip-prinsip Etika Bisnis yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Hukum

Prinsip-prinsip etika bisnis merupakan landasan bagi perilaku perusahaan dan memengaruhi bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab hukumnya. Beberapa prinsip etika bisnis yang mempengaruhi tanggung jawab hukum antara lain:

- **Integritas:** Perusahaan diharapkan untuk bertindak dengan jujur dan adil dalam semua aspek bisnisnya, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran hukum.
- **Transparansi:** Mengungkapkan informasi secara jelas dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan dapat memperkuat kepercayaan dan mengurangi risiko hukum terkait dengan praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal.
- **Kepatuhan Hukum:** Perusahaan harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam lingkungan

operasinya, dan secara aktif memastikan bahwa kepatuhan tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi.

- **Perlindungan Konsumen:** Menghormati hak dan kepentingan konsumen, seperti memberikan informasi yang jelas tentang produk dan layanan, adalah aspek penting dari tanggung jawab hukum perusahaan.

2.4.2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR)

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah konsep yang menekankan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih luas selain mencari keuntungan finansial, yaitu terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prinsip-prinsip CSR yang mempengaruhi tanggung jawab hukum dalam bisnis antara lain:

- **Pemeliharaan Lingkungan:** Perusahaan diharapkan untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan, serta mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan yang sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku.
- **Keterlibatan Masyarakat:** Berpartisipasi aktif dalam pembangunan komunitas lokal, mendukung inisiatif sosial, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat adalah bagian integral dari tanggung jawab hukum perusahaan.
- **Pengelolaan Risiko Sosial:** Mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia atau ketidaksetaraan gender, merupakan komponen penting dalam memenuhi tanggung jawab hukum perusahaan.

2.4.3. Implikasi Praktis dalam Penegakan Tanggung Jawab Hukum

Penegakan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam praktik bisnis melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan etika yang berlaku. Implementasi kebijakan internal yang sesuai dengan peraturan hukum dan norma-norma etika adalah langkah awal yang krusial. Kebijakan semacam itu harus mencakup prosedur

yang jelas untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum (Velasquez, 2014). Misalnya, kebijakan etika bisnis yang melarang korupsi atau diskriminasi.

Pemantauan kinerja perusahaan terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab hukum merupakan tahap berkelanjutan dalam memastikan kepatuhan. Hal ini bisa dilakukan melalui audit internal atau eksternal, evaluasi kinerja, dan mekanisme pelaporan yang transparan. Dengan adanya sistem pemantauan yang efektif, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius.

Keterlibatan dalam proses hukum menjadi penting jika perusahaan dihadapkan pada situasi di mana prinsip-prinsip tanggung jawab hukum telah dilanggar atau jika terdapat tuntutan hukum terhadap perusahaan. Ini dapat melibatkan bekerja sama dengan pengacara atau konsultan hukum untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menanggapi tuntutan hukum, serta memastikan bahwa perusahaan memiliki representasi yang memadai di pengadilan.

Perusahaan juga dapat mengambil langkah proaktif dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO 26000 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 memberikan panduan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang dapat membantu perusahaan mematuhi prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dalam bisnis. Dengan menerapkan standar internasional ini, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan.



Bab 8

ETIKA BISNIS DAN KEPATUHAN HUKUM

8.1 Etika Bisnis

8.1.1 Integritas

Integritas dalam etika bisnis memainkan peran penting dalam membentuk fondasi kepercayaan antara perusahaan, pelanggannya, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya (Archie & Carroll, 2014). Hal ini mengacu pada praktik menjalankan bisnis dengan kejujuran dan transparansi, memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan diambil dengan

cara yang adil dan jujur. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari integritas dalam etika bisnis:

1. Kejujuran dalam Komunikasi

Menyediakan informasi yang akurat dan lengkap tentang produk atau layanan, termasuk potensi risiko, manfaat, dan ketentuan penggunaan. Komunikasi yang jujur membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan pelanggan.

2. Transparansi Keuangan

Melibatkan pembukaan informasi keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan secara terbuka dan jujur, termasuk laporan keuangan, pajak, dan transaksi. Transparansi keuangan membantu membangun kepercayaan dengan investor, kreditor, dan pasar.

3. Pengambilan Keputusan yang Adil

Mengambil keputusan bisnis berdasarkan evaluasi objektif dari semua fakta relevan, tanpa memihak atau diskriminasi. Hal ini mencakup praktik perekrutan, promosi, dan kompensasi karyawan yang adil serta pengambilan keputusan pembelian dan penjualan yang etis.

4. Penghormatan terhadap Hak-hak Pihak Terkait

Menghormati hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam atau dipengaruhi oleh operasi bisnis, termasuk pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan.

5. Penolakan terhadap Korupsi

Berkomitmen untuk menolak segala bentuk korupsi, suap, dan praktik tidak etis lainnya dalam semua transaksi bisnis dan interaksi dengan pemerintah, pemangku kepentingan, dan pihak ketiga.

6. Tanggung Jawab Produk

Bertanggung jawab atas kualitas, keamanan, dan keandalan produk atau layanan yang ditawarkan, serta memberikan dukungan yang memadai untuk produk atau layanan tersebut.

7. Pengelolaan Konflik Kepentingan

Mengidentifikasi dan mengelola dengan tepat setiap konflik kepentingan yang mungkin muncul, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa semua keputusan bisnis diambil dengan kepentingan terbaik perusahaan.

Integritas dalam etika bisnis tidak hanya membantu membangun reputasi yang baik di mata publik tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang positif dan produktif, memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Praktik bisnis yang integritas menjadi faktor diferensiasi penting yang dapat menarik pelanggan, karyawan, dan investor yang berharga.

8.1.2 Keadilan

Keadilan dalam etika bisnis mengacu pada prinsip memperlakukan semua individu dan entitas dengan keadilan, kesetaraan, dan tanpa diskriminasi. Hal ini adalah salah satu prinsip fundamental yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya, termasuk karyawan, pelanggan, pesaing, dan masyarakat luas. Berikut ini adalah beberapa aspek kunci dari keadilan dalam konteks bisnis:

- Keadilan terhadap Karyawan
 - Menyediakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung.
 - Memastikan kesetaraan peluang dalam hal rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier.
 - Memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, serta mengakui dan memberi penghargaan atas kontribusi mereka.
 - Mendengarkan dan menghargai masukan dari karyawan serta menangani keluhan dengan objektif dan adil.
- Keadilan terhadap Pelanggan
 - Menawarkan produk atau layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan deskripsi serta janji perusahaan.

- Memastikan harga yang ditetapkan adil dan transparan, tanpa menyembunyikan biaya atau informasi penting lainnya.
- Menanggapi keluhan dan pertanyaan pelanggan dengan cepat dan adil, berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak.
- Keadilan terhadap Pesaing
 - Berkompetisi di pasar dengan cara yang etis dan adil, menghindari praktik tidak adil seperti pencemaran nama baik, penggunaan informasi rahasia secara tidak sah, atau manipulasi pasar.
 - Menghormati hak kekayaan intelektual pesaing dan menghindari plagiarisme.
 - Berpartisipasi dalam praktik bisnis yang meningkatkan integritas dan keadilan dalam industri.
- Keadilan dalam Masyarakat
 - Berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan dengan cara yang positif, memastikan operasi bisnis tidak merugikan masyarakat setempat atau lingkungan.
 - Berinvestasi dalam praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang menguntungkan tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat dan lingkungan.

Keadilan dalam bisnis tidak hanya membangun kepercayaan dan loyalitas dari karyawan dan pelanggan tetapi juga membantu dalam menciptakan reputasi positif dan berkelanjutan untuk perusahaan (Crane et al., 2019). Mengarah pada kinerja bisnis yang lebih baik dalam jangka panjang, memungkinkan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan pasar yang ketat dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan etis dalam industri.

8.2 Kepatuhan Hukum

8.2.1 Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan hukum merupakan aspek krusial dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan etis. Setiap perusahaan, tanpa memandang ukuran atau sektor industri, diwajibkan untuk mengikuti kerangka hukum yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan yakni lokal, nasional, dan internasional. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan meliputi, memahami dan mematuhi hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah atau kota. Ini bisa mencakup peraturan zonasi, standar kebersihan, dan ketentuan tenaga kerja lokal. Kerap kali, bisnis harus mendapatkan izin atau lisensi khusus dari otoritas lokal untuk beroperasi.

Mengikuti hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yang mencakup aspek-aspek seperti pajak, tenaga kerja, keamanan produk, perlindungan konsumen, dan lingkungan. Kepatuhan terhadap standar nasional seperti kode etik industri, standar kualitas, dan ketentuan perlindungan data pribadi. Untuk bisnis yang beroperasi di lebih dari satu negara atau yang terlibat dalam perdagangan internasional, penting untuk mengikuti hukum internasional yang relevan. Hal ini termasuk perjanjian perdagangan, regulasi impor-ekspor, dan hukum tenaga kerja internasional. Memahami dan mematuhi standar internasional seperti ISO dan standar industri khusus yang berlaku secara global.

Kepatuhan hukum membantu menghindari denda, sanksi, dan konsekuensi hukum lainnya yang dapat merugikan secara finansial dan merusak reputasi bisnis (Trevino & Nelson, 2021). Bisnis yang dikenal mematuhi hukum membangun kepercayaan dengan pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Memahami dan mengimplementasikan kepatuhan hukum secara proaktif dapat membantu mencegah risiko hukum dan keuangan di masa depan. Proses kepatuhan sering kali mengharuskan bisnis untuk meninjau

dan memperbaiki prosedur internalnya, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Untuk memastikan kepatuhan hukum, perusahaan perlu menetapkan sistem internal untuk memantau kepatuhan hukum, yang mungkin mencakup pembentukan departemen hukum atau pengangkatan seorang officer kepatuhan. Memberikan pelatihan reguler kepada karyawan mengenai hukum dan regulasi yang relevan dengan operasi bisnis. Melakukan audit dan *review* kepatuhan secara berkala untuk memastikan bahwa semua operasi bisnis tetap sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Melakukan bisnis dengan kepatuhan hukum tidak hanya merupakan kewajiban legal tetapi juga elemen penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

8.2.2 Standar Industri

Mematuhi standar industri adalah bagian integral dari kepatuhan hukum dan etika bisnis. Standar ini ditetapkan oleh asosiasi industri, badan pengatur, atau organisasi standarisasi profesional dan dirancang untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan keandalan produk atau layanan (Ferrell et al., 2008). Membantu dalam memfasilitasi perdagangan yang adil dan persaingan yang sehat di pasar. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kepatuhan terhadap standar industri:

- Standar industri sering kali mencakup spesifikasi teknis, praktik terbaik, dan pedoman keselamatan yang harus diikuti perusahaan untuk memastikan produk atau layanannya memenuhi tingkat kualitas tertentu dan aman untuk konsumen.
- Dengan mengadopsi standar yang diakui secara luas, perusahaan dapat memastikan produk atau layanannya dapat bersaing di pasar global, memudahkan perdagangan lintas batas, dan mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan.
- Standar dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dengan menyediakan kerangka kerja untuk proses manufaktur, manajemen kualitas, dan kontrol lingkungan.

- Kepatuhan terhadap standar industri menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.
- Di beberapa sektor, standar industri mungkin diadopsi oleh badan pengatur sebagai bagian dari regulasi legal, menjadikan kepatuhan terhadap standar tersebut bukan hanya masalah pilihan, tetapi keharusan legal.

Langkah-langkah untuk Mematuhi Standar Industri:

- **Identifikasi Standar yang Relevan**
Mempelajari dan mengidentifikasi standar industri yang relevan dengan operasi bisnis termasuk standar internasional, nasional, atau spesifik sektor.
- **Penilaian dan Gap *Analysis***
Melakukan penilaian untuk menentukan sejauh mana operasi bisnis sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- **Implementasi dan Pemantauan**
Menerapkan perubahan yang diperlukan untuk memenuhi standar dan monitor secara berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.
- **Sertifikasi**
Dalam beberapa kasus, mungkin perlu untuk mendapatkan sertifikasi dari badan akreditasi yang diakui untuk membuktikan kepatuhan terhadap standar industri tertentu.
- **Pelatihan Karyawan**
Memastikan karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai tentang standar yang berlaku dan pentingnya mematuhi standar tersebut dalam pekerjaan mereka sehari-hari.

Mematuhi standar industri bukan hanya tentang memenuhi kewajiban legal tetapi adalah investasi dalam kualitas, keberlanjutan, dan reputasi jangka panjang bisnis.

8.3 Sinergi antara Etika Bisnis dan Kepatuhan Hukum

Tabel 8.1 Sinergi antara etika bisnis dan kepatuhan hukum serta contohnya

Aspek	Etika Bisnis	Kepatuhan Hukum	Contoh
Reputasi dan Kepercayaan	Membangun kepercayaan melalui transparansi dan integritas	Mematuhi peraturan dan standar hukum yang berlaku	Perusahaan A secara terbuka berbagi laporan keberlanjutan yang detail, sementara juga memenuhi semua regulasi lingkungan
Pengelolaan Risiko	Menghindari perilaku tidak etis yang dapat menimbulkan risiko	Mencegah pelanggaran hukum yang mengakibatkan denda atau sanksi	Perusahaan B mengadakan pelatihan etika bagi karyawannya untuk mencegah korupsi, sambil memastikan semua operasinya memenuhi standar hukum antikorupsi
Keberlanjutan	Menerapkan praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial	Memenuhi regulasi terkait lingkungan dan sosial	Perusahaan C berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan membantu komunitas lokal, sejalan dengan kepatuhan terhadap regulasi pengurangan emisi
Inovasi	Mendorong inovasi yang mempertimbangkan	Menghormati hukum paten dan hak cipta,	Perusahaan D mengembangkan produk baru yang

	dampak sosial dan lingkungan	mempromosikan inovasi yang legal	ramah lingkungan dengan paten yang sah, mendorong inovasi tanpa melanggar hak kekayaan intelektual orang lain
Hubungan Kerja	Memperlakukan karyawan dengan adil dan hormat	Mematuhi hukum ketenagakerjaan termasuk keselamatan kerja dan upah minimum	Perusahaan E menerapkan kebijakan inklusi yang kuat dan membayar upah yang adil, melebihi standar minimum legal

Pada tabel di atas menunjukkan bagaimana etika bisnis dan kepatuhan hukum bekerja secara komplementer untuk membangun fondasi bisnis yang kuat dan bertanggung jawab (Weiss, 2021). Melalui sinergi ini, perusahaan tidak hanya memenuhi ekspektasi hukum tetapi juga menetapkan standar yang lebih tinggi dalam praktik bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi, keberlanjutan, inovasi, dan hubungan kerja yang sehat.

Kesimpulan

Pada bisnis modern, pemahaman yang kuat tentang hukum bisnis menjadi kunci keberhasilan. Buku ini telah menguraikan beberapa aspek penting dalam hukum bisnis, mulai dari pembahasan mengenai kontrak bisnis hingga tanggung jawab dan kewajiban yang terkait. Kontrak bisnis merupakan fondasi dari hubungan bisnis yang sukses, dan telah dijelaskan bagaimana persetujuan, deskripsi produk atau layanan, pembayaran, serta penyelesaian sengketa menjadi bagian integral dari pembentukan kontrak yang kuat dan sah secara hukum. Selain itu, buku ini juga membahas pentingnya pemahaman tentang prosedur pembatalan atau pemutusan kontrak, serta konsekuensi hukum yang terkait dengan tindakan tersebut. Disamping itu, perubahan pada kontrak juga merupakan hal yang biasa dalam lingkungan bisnis yang dinamis, dan telah diuraikan bagaimana ketentuan perubahan pada kontrak harus diatur secara jelas dan terstruktur untuk memastikan perubahan dapat diterapkan dan berlaku dengan efektif.

Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis adalah suatu keharusan bagi setiap individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Dengan memiliki pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan kontrak, pembayaran, perubahan, dan pembatalan kontrak, pelaku bisnis dapat meminimalkan risiko hukum, mengelola sengketa dengan lebih efektif, dan membangun hubungan bisnis yang kuat dan saling percaya. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum bisnis yang tepat dapat menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Ramadhan, A. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Hak Konsumen di Era Digital Pada Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection). *Jurnal Al-Mudharabah*, 4(1), 1-14. doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017
- AbuRaya, R. (2020). Business Analytics of E-Commerce Policy and Practice: An Ethical Perspective. *2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (DASA)*, 761-767. https://doi.org/10.1109/DASA51403.2020.9317117
- Adhi, Y. P., Sulistianingsih, D., & Putri, V. N. S. (2019). Membangun Kesejahteraan Masyarakat Lokal Melalui Perlindungan Indikasi Geografis. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1-12. doi.org/10.26877/M-Y.V2I1.3416
- Akbar, M. H. (2016). *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kalimantan Barat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kota Pontianak)*.
- Archie, B., & Carroll, B. (2014). *Business & society: Ethics, sustainability, and stakeholder management*. CL-South-Western Cengage Learning.
- Aswar, A., & Willem, R. (2023). Perlindungan Hukum Yang Adil Bagi Konsumen. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(1), 2023. doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35368
- Barker, G. R. (2019). The Law and Economics of Copyright Law and Copyright Exceptions, Limitations, and Immunities. *Social Science Research Network*. doi.org/10.2139/SSRN.3315619

- Block, C. D., Glogower, A., & Blank, J. D. (2022). *Corporate Taxation: Examples and Explanations*. Aspen Publishing.
- Boukattaya, S., Achour, Z., & Hlioui, Z. (2021). Corporate Social Responsibility and Corporate Financial Performance: An Empirical Literature Review. *International Journal of Innovative Research and Publications*, 1-32. doi.org/10.51430/IJIRP.2021.13.001
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization*. Oxford University Press, USA.
- Dewa Gede Sudika Mangku. (2012). Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Eiselen, S. (2022). The Adoption of the Vienna Convention for the International Sale of Goods (CISG) 1980 in Africa – A Critical Analysis. *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, 55(1). <https://doi.org/10.25159/2522-3062/10808>
- Fatimah, S., Widiyanti, E., Azizah, R. E., Maharani, W., & Fahmi, M. (2022). Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(5), 609-620.
- Febrianty, Y., Ari, E. A., Suhariyanto, D., Ambarsari, N., & Gussman, A. A. (2023). *Sistem Hukum Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2008). *Business ethics: Ethical decision making*. Houghton Mifflin Company.
- Fibrianti, N. (2020). Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen: Sinergi Negara, Pelaku Usaha dan Konsumen. *Borobudur Law Review*, 2(2), 90-101. <https://doi.org/10.31603/burrev.3971>
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189. doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599

- Gerber, D. (1996). *Intellectual Property Rights, Economic Power, and Global Technological Integration*.
- Gibson, A., & Osborne, S. (2020). *Business Law* (11e ed.). Pearson Australia.
- Greenway, A. R. (2000). *Environmental Permitting Handbook*. McGraw Hill.
- Iriani, D. (2016). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>
- Jing, W. (2023). An Analysis of Cultural Differences and Translation Strategies in Trademark Translation Based on Adaptation Theory. *International Journal of English Language and Linguistics Research*, 11(3), 49–68. <https://doi.org/10.37745/IJELLR.13/VOL11N34968>
- Juanda, J., & Ali, H. (2022). Literature Review Hukum Bisnis: Monopoli Bisnis Dan Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(2), 233–240.
- Kalanje, C. M. (2005). *Role of Intellectual Property in Innovation and New Product Development*.
- Konold, W. G. (2019). *Types of Intellectual Property*. <https://doi.org/10.1201/9780203733851-7>
- Kotenko, M. V. (2023). Intellectual property as an independent concept of legal science: a value-legal approach to definition. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 1(79), 64–69. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.79.1.10>
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Margono, S. (2012). Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas

- Kepemilikan Publikasi Pertama Kali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.V1I2.99>
- Merkin KC, R., & Saintier, S. (2023). *Poole's Casebook on Contract Law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780192885081.001.0001>
- Moir, H. V. J. (2008). What are the Costs and Benefits of Patent Systems? *Law & Economics*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1409503>
- Moon, J. (2014). *Corporate Social Responsibility: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Moutinho, P., Fernández, J., & Doiro, M. (2016). *Academic Patenting: A Systematic Review Of The Literature*.
- Mukhtar, S., Ashiqin Zainol, Z., & Jusoh, S. (2021). Provisional Measures of Trademark Enforcement in Pakistan: A Comparative Analysis with Malaysia and USA. *Economics, Law and Policy*, 4(1), p7. <https://doi.org/10.22158/ELP.V4N1P7>
- Mukhtar, S., Zainol, Z. A., & Jusoh, S. (2022). Border Measures of Trademark Enforcement in Pakistan: A Comparative Analysis with Malaysia and USA. *Economics Law and Policy*, 5(2), p55. <https://doi.org/10.22158/ELP.V5N2P55>
- Nadtochiy, I. O., & Novikov, O. A. (2023). The Concept And Functions Of A Trademark In Civil Circulation. Types Of Trademarks. *Questions of State and Law*, 2(2), 29-34. <https://doi.org/10.24888/2949-3293-2023-2-2-29-34>
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627-640.
- Octavia, P. A., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12-18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>

- Park, J. H. (2010). Costs and Benefits of Patent Systems. *Patents and Industry Standards*. <https://doi.org/10.4337/9781849805483.00013>
- Percival, R. V. (2000). *Environmental Regulation: Law, Science, and Policy*. Aspen Law & Business.
- Prasnowo, A. D., & Badriyah, S. M. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 61. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356
- Quintais, J. P., Katzenbach, C., Schwemer, S. F., Dergacheva, D., Riis, T., Mezei, P., Harkai, I., & Magalhães, J. C. (2024). Copyright Content Moderation in the European Union: State of the Art, Ways Forward and Policy Recommendations. *IIC International Review of Intellectual Property and Competition Law*. <https://doi.org/10.1007/S40319-023-01409-5>
- Ramdani, A., Raji, R., & Ahmad, Mohd. K. (2024). Exploring the concept and the communication principles of negotiation among Islamic corporate organizations. *Journal of Islamic Marketing*, 15(4), 1115–1135. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2023-0027>
- Romadhon, N., Rasyid, M., & Handayani, S. (2020). *Aspek Hukum Pencatatan Hak Cipta Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2003). *Fundamentals of Corporate Finance*. McGraw-Hill Companies, Inc.
- Shi, X. (2010). *Towards a relational theory of copyright law*.
- Solomon, J. (2020). *Corporate Governance and Accountability*. Wiley.
- Sri Ka'bah, S. H., & Hasan, M. J. (2024). *Pengantar Hukum Bisnis*. Azka Pustaka.

- Sudarwati, Y., & Izzaty. (2022). Manajemen Hubungan Pelanggan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 13–28. <https://doi.org/10.22212/JEKP.V13I1.1988>
- Sunanto, R., Tondy, C. J., & Irhamsah, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Terkait Penerapan Perjanjian Baku Sektor Pelayanan Publik. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1200–1207.
- Talesh, S. A. (2010). Bargaining in the Shadow of “Shadow Law”: An Ethnography of How Business Organizations Shape the Meaning of Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1641537>
- Tampi, J. M. (2020). Perlindungan Haki Pada Perjanjian Lisensi Bagi Dunia Bisnis Di Indonesia... *Lex Privatum*, 8(4).
- Trevino, L. K., & Nelson, K. A. (2021). *Managing business ethics: Straight talk about how to do it right*. John Wiley & Sons.
- Udalova, N. M., & Vlasova, A. S. (2021). The concept and types of intellectual property. *Intellectual Property in Russia*, 3–38. <https://doi.org/10.4324/9781003098379-2>
- Velasquez, M. G. (2014). *Business Ethics: Concepts and Cases* (7. ed.). Pearson Education Limited.
- Vijayantera, I. W. A., & Dewi, N. K. R. K. (2021). Hukum Bisnis Bagian I: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis. *Unmas Press*.
- Villios, S. (2023). Business taxation law. In *Contemporary Australian Business Law* (pp. 394–426). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108980982.015>
- Weinberg, P. (2006). *Environmental Law: Cases and Materials*. University Press of America.
- Weiss, J. W. (2021). *Business ethics: A stakeholder and issues management approach*. Berrett-Koehler Publishers.
- Wibowo, A. (2022). Transformasi Ekonomi Digital. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.

Zahra, Z. A., Yudistira, A., & Alvan, N. F. (2023). Literature Review: Peran Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Dan Hukum Bisnis Dalam Aktivitas Perusahaan Sebagai Organisasi Bisnis. *Jurnal Pijar*, 1(2), 266-274.

Biodata Penulis



KBP Dr. Sulastiana, S.I.P., S.H., M.Si.
Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian RI

Penulis lahir di Situbondo tanggal 10 Oktober 1972. Penulis adalah dosen pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Politik dan Sarjana Hukum, melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan menyelesaikan S3 Kriminologi dengan predikat Cumlaude. Penulis adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah mengikuti PPRA LVII Lemhannas RI serta menekuni penelitian di bidang hukum dan kriminologi. Aktif sebagai pembicara di konferensi Nasional dan Internasional seperti di Singapura, Jerman, Italia dan Amerika. Sertifikasi yang pernah diikuti adalah Human Capitan dan Risk Management serta mengikuti kursus di Australia.



**Dr. Teddy Oswari, S.E., M.M., M.I.Kom.
Dosen Universitas Gunadarma**

Penulis lahir di Curup tanggal 13 Juli 1974. Penulis adalah dosen di Universitas Gunadarma. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen, melanjutkan S2 pada Jurusan Perbankan dan Ilmu Komuniasi dan menyelesaikan S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Gunadarma dan Sandwich Program pada Laurentian University, Ontario, Canada. Penulis aktif meneliti dan menulis pada Bidang Manajemen, Ekonomi, Ilmu Komunikasi dan Sistem Informasi. Penulis juga aktif sebagai pembicara tamu di konferensi Nasional dan Internasional seperti di Singapura, Korea, Taiwan dan India. Saat ini sebagai Asesor Kompetensi Bidang Manajemen, Asesor Beban Kinerja Dosen dan Auditpr Mutu Internal - Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi